

**PENERAPAN AKAD IJARAH
PADA PRODUK MULTIJASA PJTKI
DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

Dyah Febri Ariyani

132503086

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Drs. Zaenuri, MH
Desa Sumberjosari RT. 01 RW. 02
Kel. Karang Ruyung, Kab. Grobogan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir An. Dyah Febry Ariyani

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Dyah Febry Ariyani

NIM : 132503086

Judul : Penerapan Akad Ijarah pada Produk Multijasa
PJTKI di BPRS

Gala Mitra Abadi Purwodadi

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 18 Mei 2016

Pembimbing



Drs. Zaenuri, MH

NIP. 19610315 199703 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Dyah Febri Ariyani
NIM : 132503086
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **“PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PRODUK MULTIJASA PJTKI DI
BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:

09 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 09 Juni 2016

Mengetahui,

Penguji I

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.

NIP. 19710830 199803 1 003

Penguji II

Mohammad Nadzir, SHI., MSI.

NIP. 19730923 200312 1 002

Penguji III

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.

NIP. 19690830 199403 2 003

Penguji IV

Heny Yuningrum, SE., M.Si

NIP. 19810609 200710 2 005



Pembimbing

Drs. Zaenuri, MH
NIP. 19610315 199703 1 001

MOTTO

لِكُلِّ عَمَلٍ ثَوَابٌ وَلِكُلِّ كَلَامٍ جَوَابٌ

“Setiap Pekerjaan itu ada balasannya, dan setiap perkataan itu ada jawabannya”

(Mahfudzot)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini, akan saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan ibu saya, Bapak Shobirin dan Ibu Nanik Purwanti yang selalu tulus menyayangi saya, rela berkorban dengan ikhlas untuk mencari nafkah bagi kesuksesan anak-anaknya, serta selalu sabar dalam mendidik, memberikan nasehat, bimbingan dan doa yang terus mengalir menyertai saya, sehingga membuat saya menjadi orang yang sangat bersyukur dan sangat bangga memiliki orangtua seperti mereka. Ini adalah sebagian perjuangan cita-cita saya untuk kedua orangtua saya.
2. Adham Septia Wildan Satrio yang selalu memberikan motivasi dan membantu kepada saya untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Adik saya Erlinda Risky Amalia yang telah memotivasi saya dan memberikan pengertian kepada saya untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir.
4. Seluruh keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya.
5. Sahabat-sahabat terbaik saya (Yani, Nila, Ida, Muna, Fay, Elia, Ivana) yang selalu menemani hari-hari saya di kampus, saling membantu dan memberi motivasi arahan-arahan yang baik untuk saya.
6. Orang-orang sekeliling saya yang selalu membuat saya lebih baik dan tidak patah semangat.
7. Teman-teman angkatan 2013 PBSC atas kebersamaan yang sudah dilalui bersama-sama selama ini.
8. Pihak BPRS Gala Mitra Abadi yang senantiasa membantu dan membimbing saya selama Praktek Kerja Lapangan.


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 April 2016



Deklarator


Dyah Febri Arivani
NIM: 132503086

ABSTRAK

BPRS Gala Mitra Abadi di Purwodadi melakukan kegiatan penyaluran dana dari masyarakat salah satunya menggunakan produk pembiayaan dengan Akad *Ijarah* Multijasa. Akad *Ijarah* Multijasa adalah akad yang digunakan oleh suatu lembaga keuangan apabila dalam pengajuan pembiayaan objeknya lebih dari satu seperti *Ijarah* Multijasa. Dalam hal ini produk pembiayaan *Ijarah* Multijasa adalah produk unggulan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi dan peminatnya lumayan tertarik dengan produk pembiayaan ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menjadikan penelitian ini dengan judul “Penerapan Akad *Ijarah* pada Produk Multijasa PJTKI di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”

Dengan diadakan penelitian yang bersifat kualitatif. Data-data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan tersebut didapatkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pembiayaan dengan Akad *Ijarah Multijasa* yang dilakukan merupakan salah satu produk jasa Perbankan Syariah yang diterapkan untuk pembiayaan kesehatan, pendidikan, pernikahan, umrah dan khususnya pembiayaan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia untuk membiayai atau mengurus dokumen TKI.

Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme yang ada dalam pembiayaan *Ijarah Multijasa* yaitu proses pembiayaan dan syarat-syarat nasabah untuk mengajukan pembiayaan. Dan penerapan Akad *Ijarah Multijasa* yang dilakukan bank berdasarkan objek kebutuhan pada saat nasabah melakukan pengajuan pembiayaan kepada BPRS Gala Mitra Abadi. Sedangkan Pembiayaan *Ijarah Multijasa* BPRS Gala Mitra Abadi untuk mengurus dokumen calon TKI, seperti Medical checkup, visa, passport, Surat Rekomendasi, dan Tiket Pesawat.

Kata Kunci : *Penerapan, Pembiayaan, Multijasa, Ijarah*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua khususnya kepada penulis, berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pogram studi D3 Perbankan Syariah yang dilaksanakan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, nabi yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M,Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag., MM selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. Zaenuri, MH. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
5. Pihak BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yang bersedia menjadi objek penelitian dan pelaksanaan Tugas Akhir ini.
6. Kedua orangtua saya yang senantiasa mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

7. Teman-temanku seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir dengan lancar.

Sebagai penutup, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna pengembangan penulisan Tugas Akhir selanjutnya.

Semarang, 13 Mei 2016

Penyusun



Dyah Febry Ariyani

132503086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Akad <i>Ijarah</i>	10
1. Pengertian Akad	10
2. Pengertian <i>Ijarah</i>	12
3. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	14
4. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	16
B. Pembiayaan Multijasa	18
C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	19

**BAB III : GAMBARAN UMUM BPRS GALA MITRA ABADI
PURWODADI**

A. Sejarah Berdirinya BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi ..	21
B. Visi dan Misi	23
C. Bidang Usaha	24
D. Struktur Organisasi	30
E. <i>Job Description</i>	31

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembiayaan Multijasa PJTKI dengan Akad <i>Ijarah</i> di BPRS Gala Mitra Abadi	39
B. Penerapan Akad <i>Ijarah</i> Multijasa di BPRS Gala Mitra Abadi	41

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
C. Penutup	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu (1) menerima simpanan uang, (2) meminjamkan uang, dan (3) memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak jaman Rasulullah SAW.

Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak jaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat islam, bahkan sejak jaman Rasulullah SAW.¹

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian di salurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan,

¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam-Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003, h. 22

meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dari pengertian dan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.²

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan Negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, maka pada 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan bertambah.

Di tahun-tahun mendatang, jumlah bank syariah ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya pemain-pemain baru, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang sudah ada, maupun dengan dibukanya *Islamic Window* di bank-bank konvensional.

Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim *Business Consulting*, diproyeksikan bahwa total asset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2850% selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh 356.25% tiap tahunnya. Sebuah pertumbuhan asset yang sangat mengesankan. Tumbuh kembangnya asset bank syariah ini dikarenakan adanya kepastian di sisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syariah.³

Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana

²A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 1

³ Karim, *Bank*, h. 29

sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Secara konsep operasional Lembaga Keuangan Syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Kantor cabang syariah bank konvensional/ Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal Wattamwil (BMT) dari alur operasional dan konsep syariahnya tidaklah berbeda. Yang membedakan BUS, BPRS, BMT adalah pada skalanya saja dalam menghimpun dan menyalurkan dana dalam jumlah yang besar-besaran, BPRS pada jumlah yang sedang-sedang saja, BMT pada jumlah yang kecil atau mikro, dimana jumlah-jumlah tersebut sangat bergantung pada besaran risiko yang ditanggung oleh LKS tersebut. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebelum UU perbankan syariah dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah juga merupakan lembaga intermediasi keuangan, akan tetapi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dalam lalu lintas pembayaran.

Berdirinya BPR Syariah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan diatas. Lebih jelasnya keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah pada tingkat nasional. Bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun 1992. Namun jangkauan BMI terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya di kabupaten, kecamatan dan desa. Oleh karenanya peran BPR Syariah diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.⁴

Dalam pembiayaan *ijarah*, barang yang disewa oleh nasabah bukan milik nasabah, karena itu secara yuridis nasabah tidak bisa menjadikan objek sewa tersebut sebagai agunan. Fatwa DSN09/DSN-MUI/VI/2000

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, h. 84

tentang Pembiayaan *Ijarah* menyebutkan bahwa kewajiban LKS (Bank Syariah) adalah menyediakan barang yang disewakan. Berdasarkan fatwa tersebut dapat ditafsirkan bahwa bank tidak perlu memiliki objek sewa. Karena itu, apabila objek sewa tersebut milik pihak ketiga dan bukan milik Negara atau Pemda, maka objek sewa dimungkinkan menjadi agunan atas pembiayaan *ijarah* atau jaminan pihak ketiga.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Akad *Ijarah* pada Pembiayaan Multijasa PJTKI di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan multijasa PJTKI dengan akad *Ijarah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi ?
2. Bagaimana penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan Multijasa PJTKI di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan Multijasa PJTKI dengan akad *Ijarah* yang ada di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
2. Untuk mengetahui penerapan Akad *Ijarah* pada pembiayaan Multijasa PJTKI di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi penulis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan memantapkan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan terutama mengenai produk pembiayaan *Ijarah Multijasa*, dan penerapan akad dalam pembiayaan.

⁵ Wangsasawidjaja, *Pembiayaan*, h. 214

2. Bagi Prodi D3 Perbankan Syariah

Menambah informasi dan dapat dijadikan referensi, khususnya bagi akademisi mengenai Penerapan Akad *Ijarah* pada pembiayaan Multijasa.

3. Bagi Perusahaan (BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi)

Sebagai bahan untuk membagi informasi kepada para nasabah tentang penerapan Akad *Ijarah* pada Pembiayaan Multijasa di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi dan informasi dalam pengambilan keputusan perusahaan.

4. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan masyarakat mengenai pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* yang ada dalam bank syariah meliputi karakteristik, dan penerapannya, sehingga masyarakat lebih paham dan mengetahuinya.

D. Tinjauan Pustaka

Karya ilmiah baik skripsi maupun Tugas Akhir yang menganalisis tentang Pembiayaan jasa dengan akad *Ijarah* sudah banyak digunakan. Ada beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut di antaranya :

Ruri Priti Ariskasari NIM : 112503100, Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo tahun 2014 dalam Tugas Akhirnya yang berjudul Analisis Penerapan Akad *Ijarah* Multijasa untuk Sistem Pembiayaan di PT. BPRS PNM Binama Semarang. Adapun penerapan pembiayaan *ijarah* multijasa merupakan produk pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan atas manfaat akan suatu jasa. Jadi tujuan produk ini adalah memenuhi kebutuhan Mitra atau nasabah. Jenis produk ini adalah pembiayaan

konsumtif yang berjangka waktu panjang dengan maksimal jangka waktu 8 tahun.⁶

Inayatul Asyiah NIM : 122503055, Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo tahun 2015 dalam Tugas Akhirnya yang berjudul Implementasi Produk Pembiayaan Multijasa di BPRS PNM BINAMA Semarang. Dalam pembiayaan multijasa ini pihak PT. BPRS PNM BINAMA Semarang memberikan pilihan kepada nasabah apakah pembayaran kepada pihak ketiga akan dibayarkan sendiri atau diwakilkan oleh pihak Bank. Tetapi nasabah pada umumnya memilih untuk membayarkan sendiri kepada pihak ketiga. Apabila hal itu terjadi, maka pihak Bank memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk melakukan pembayaran.⁷

E. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini, penulis melakukan penelitian dari data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diproses. Adapun metode penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok.⁸

2. Sumber Data

Dalam pengambilan data penulis menggunakan dua jenis data:

⁶ Ruri Priti Ariskasari, "*Analisis Penerapan Akad Ijarah Multijasa untuk Sistem Pembiayaan di PT. BPRS PNM Binama Semarang*", Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014

⁷ Inayatul Asyiah, "*Implementasi Produk Pembiayaan Multijasa di BPRS PNM BINAMA Semarang*", Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015

⁸ M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Ar-Ruzz Media, h. 89

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber utama atau dikumpulkan langsung dari peneliti sendiri.⁹ Dalam hal ini penulis melakukan *interview* atau wawancara langsung dengan pihak BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi dan nasabah/ mitra.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data primer yang telah dikelola lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.¹⁰ Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari catatan-catatan buku atau modul, laporan-laporan atau dokumen.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian studi kasus ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.¹¹ Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data, dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden (pihak yang terkait langsung dengan objek penulisan), sehingga dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat. Pihak yang terkait langsung dalam hal ini adalah *Customer Service* BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi serta mitra, *Customer Service* yang mengetahui prosedur akad yang akan digunakan dan nasabah atau mitra sebagai pihak yang melakukan pembiayaan.

⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008, h. 103

¹⁰ *Ibid*, hal 105

¹¹ Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Resda Karya, 2003, h. 186

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki.¹² Dalam hal ini penulis memperoleh data dengan mengamati secara langsung sistem dan prosedur BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi berkaitan pembiayaan dengan akad *Ijarah*.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.¹³ Data-data mengenai pembiayaan akad *Ijarah* Multijasa melalui referensi buku atau catatan buku. Dan dengan mempelajari buku panduan.

4. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Tujuan dari deskriptif analisis ini adalah untuk membuat deskriptif/gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dan menganalisa yang terjadi.¹⁴ Jadi metode deskriptif analisis ini memberikan diskripsi dan analisis mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan bukan untuk pengujian hipotesis. Maka dalam penulisan TA (Tugas Akhir) nanti akan mendiskripsikan mengenai “Analisis Penerapan Akad *Ijarah* pada produk pembiayaan multijasa bagi PJTKI di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.”

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini merupakan hal yang sangat penting karena memiliki fungsi menyatakan garis-garis besar masing-

¹² Cholid Narbuko, et al., *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT BumiAksara, 2003, h. 70

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 144

¹⁴ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, h. 54

masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Untuk mempermudah penelitian ini akan disusun dalam lima bab dengan tahapan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan Landasan Teori yang mendasari penelitian ini.

BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Gambaran Umum Profil Perusahaan BPRS Gala Mitra Abadi, Sejarah Berdirinya, Visi Misi, Prinsip Operasional, Nilai-nilai Perusahaan, Struktur Organisasi dan Produk-produk BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Mekanisme, dan Penerapan Akad Ijarah dalam Pembiayaan Multijasa bagi PJTKI di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Ijarah

1. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Menurut istilah para ahli Hukum Islam, akad diartikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan. Sedangkan DSN dalam Fatwa nya No. 45/DSN-MUI/II/2005 tersebut diatas, mengartikan akad sebagai transaksi atau perjanjian syar'I yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Ketentuan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 13 secara khusus mendefinisikan akad yaitu:

“Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.”

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti *wakaf*, *talak*, dan sumpah, maupun yang muncul dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (penyertaan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang di isyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu (santoso, 2003).¹

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2008, h. 35

Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam menentukan rukun akad. Jumhur ulama menyatakan, bahwa rukun akad tersebut terdiri atas:

a. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighah al-‘aqd*)

Sighah al-‘aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Sighah al-‘aqd* di wujudkan melalui ijab dan Kabul.

b. Pihak-pihak yang berakad

Suatu akad juga dapat dilakukan melalui isyarat yang menunjukan secara jelas kehendak pihak-pihak yang melakukan akad. Misalnya, isyarat yang ditunjukkan oleh orang bisu yang tidak dapat menulis. Artinya, jika orang dapat memberikan isyarat yang sudah menjadi kebiasaan baginya, dan isyarat itu menunjukkan kehendaknya untuk melakukan suatu akad, maka isyarat itu sama posisinya dengan penjelasan melalui lisan orang yang dapat berbicara secara langsung.

c. Objek akad

Objek akad itu diakui oleh syarat. Untuk objek akad ini diisyaratkan pula:

- 1) Berbentuk harta
- 2) Dimiliki oleh seseorang
- 3) Harta menurut syarat

Oleh sebab itu, jika objek akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta dalam islam, maka akadnya tidak sah, seperti khamar.²

Syarat umum suatu akad adalah:

a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum (*mukalaf*) atau objek akad itu merupakan milik orang yang tidak

²Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, h. 20-23

atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya.

- b. Akad itu tidak dilarang oleh nas syarat. Atas dasar syarat ini, seorang wali (pengelola anak kecil) tidak boleh menghibahkan harta anak kecil tersebut. Alasannya adalah melakukan suatu akad yang sifatnya menolong semata (tanpa imbalan) terhadap harta anak kecil tidak dibolehkan syarat. Oleh sebab itu, apabila wali menghibahkan harta anak kecil yang berada di bawah penampungannya, maka akad itu batal menurut syarat.
- c. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan. Artinya, di samping memenuhi syarat-syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat khususnya.
- d. Akad itu bermanfaat. Oleh sebab itu, jika seseorang melakukan suatu akad dan imbalan yang diambil merupakan kewajiban baginya, maka akad itu halal.
- e. *Ijab* tetap utuh dan *sahih* sampai terjadinya *Qabul*. Apabila *ijab* tidak utuh dan tidak *sahih* lagi ketika *Qabul* diucapkan, maka akad itu tidak sah.
- f. *Ijab* dan *Qabul* itu dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggamabarkan proses suatu transaksi.
- g. Tujuan akad itu jelas dan diakui syarat. Tujuan akad ini terkaitan erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan.³

2. Pengertian *Ijarah*

Al ijarah berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al 'iwadhu* (ganti).⁴ *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melakukan pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

³Muhammad, *Model*, h. 20-27

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah bag.13*, Bandung: Ma'rifat, 1987, h 7.

Ijarah berarti *lease contract* dan juga *hire contract*. Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).⁵

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Bagi pihak yang menyewakan, diharuskan mempersiapkan barang atau jasa yang disewa dan bagi pihak yang menyewa barang atau jasa wajib memelihara barang yang disewa.⁶

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* memberikan pengertian akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan mengenai akad *ijarah* dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan penjelasan dalam fatwa DSN terkait pembiayaan berdasarkan akad *ijarah* dapat dipahami bahwa dalam pembiayaan *ijarah*, bank tidak perlu membeli dan membalik nama objek sewa yang akan di biyai dengan fasilitas pembiayaan *ijarah* tersebut.⁷

⁵Sudarsono, *Bank*, h. 66

⁶ Osmad Muthaheer, *Akutansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 121-122

⁷Wangsasawidjaja, *Pembiayaan*, h. 213

3. Dasar Hukum

a. Al- Qur'an

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ⁸

Artinya : "... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. . . . " (Q.S. Al-Baqarah: 233)⁸

b. Hadits

- 1) Hadits riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا أَلَّا جِيزَ أَجْرَ هُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."⁹

c. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000: Pembiayaan *Ijarah*

Pertama: Rukun dan Syarat *Ijarah*:

- 1) *Sighat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Obyek akad *Ijarah*, yaitu: manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.

⁸ Q.S. Al-Baqarah (2) : 233

⁹ Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*

Kedua: Ketentuan Objek *Ijarah*

- 1) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.

- c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- 2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa :
 - a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui *Badan Arbitrasi Syari'ah* setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Rukun dan Syarat Ijarah

- a. Rukun-rukun Ijarah adalah sebagai berikut :
 - 1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyarat mengetahui manfaat barang yang

diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- 2) Shighat ijab kabul antar *Mu'jir* dan *Musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”.
- 3) *Ijab* kabul upah mengupah misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepada mu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp5.000,00”, kemudian *Musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
- 4) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - i. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diamfaatkan kegunaannya.
 - ii. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - iii. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - iv. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain(zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

b. Syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut :

- 1) Kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal.
- 2) Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna.
- 4) Objek *ijarah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.
- 5) Manfaat dari objek yang di *ijarahkan* harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh *ijarah* terhadap maksiat. Seperti mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain.
- 6) Upah/sewa dalam akad harus jelas dan sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.¹⁰

B. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya *aktiva produktif*, menurut ketentuan Bank Indonesia pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan *kontijensi* pada rekening *administrative* serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.¹¹

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

¹⁰ Ascarya, *Akad*, h. 35-37

¹¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, h. 302

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istihsna*'
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa,

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/ atau UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹²

Pembiayaan multijasa adalah transaksi pembiayaan yang melibatkan dua akad, yaitu akad :

- a. Ijarah Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang di sewakan.
- b. Kafalah Transaksi penjamin yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).¹³

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana

¹²Wangasawidjaja, *Pembiayaan*, h.78-79

¹³ Muhammad, *Manajemen*....., h. 56

sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.¹⁴

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁵

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa : Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) yaitu Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁶

¹⁴Sudarsono, *Bank*, hal 83

¹⁵Wangasawidjaja, *Pembiayaan*, h.15

¹⁶ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008*, (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009, h.41

BAB III

GAMBARAN UMUM BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI

A. Sejarah Berdirinya

PT. BPR Syariah Gala Mitra Abadi (selanjutnya disebut sebagai Bank) didirikan berdasarkan Akta Notaris No.1, Tanggal 03 April 1995 yang dibuat di hadapan Mohamad Turman, S.H. notaris di Purwokerto melalui akuisisi dan perubahan nama dari PT. BPRS *Sabilul Muttaqin* di Purwokerto, kemudian diakuisisi oleh BPRS Ben Salamah Abadi di Purwodadi.

Pada tahun 2013 BPRS Ben Salamah Abadi diakuisisi oleh Giri Muria Group (GMG). Kemudian pada bulan Oktober 2014 menempati gedung baru yang lebih presentatif, beralamat di Jl. Ahmad Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi, Grobogan. Pada bulan Februari 2015 berdasarkan Surat dari OJK berganti nama menjadi PT. BPR Syariah Gala Mitra Abadi, dengan nama dan gedung yang baru diharapkan menjadi sebuah BPRS yang lebih maju dan bermanfaat untuk masyarakat Grobogan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Menjadi BPRS yang solid dan terus berkembang secara konsisten dan fokus pada usaha mikro yang syariah.

BPR Syariah Gala Mitra Abadi berkantor pusat di kota Purwodadi Grobogan dan berencana membuka cabang di wilayah strategis lainnya, serta dikelola oleh tenaga profesional, independen, amanah dan bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perbankan yang sehat, prudent dan sesuai syariah.¹

Kepemilikan, Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen :

Dewan Komisaris terdiri atas :

1. Komisaris Utama : Alfi Hidayat, S.E.
2. Komisaris : Betty Anovia

¹ Company Profile BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Dewan Direksi terdiri atas :

1. Direktur Utama : Sugeng Supriyadi, S.E.
2. Direktur : Ahmad Saeful Anas, S.Pd. I.

Budaya Perusahaan : PT. BPRS GALA MITRA ABADI menerapkan HANDAL dan IKHLAS sebagai budaya perusahaan, HANDAL yaitu :

1. *HighPerformance*

Karyawan PT. BPRS GALA MITRA ABADI harus berprestasi sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan.

2. Amanah

Semua karyawan harus bekerja dengan amanah baik yang berkaitan dengan nasabah maupun tugas yang diberikan oleh kantor.

3. Normatif

Semua karyawan harus berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku sehingga bisa berinteraksi dengan baik di lingkungan kantor maupun masyarakat.

4. Dedikasi

Semua karyawan harus bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang diberikan oleh kantor.

5. Antusias

Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

6. Loyalitas

Selalu mengedepankan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi, termasuk menjaga nama baik perusahaan.²

Budaya Kerja yang diterapkan di PT. BPRS GALA MITRA ABADI selanjutnya adalah IKHLAS yaitu :

² Company Profile BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

1. **Integritas**

Selalu memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar karyawan.

2. **Knowledge**

Semua karyawan harus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan dunia perbankan Syariah.

3. **Habbit**

Dengan menjalankan aturan dan norma yang berlaku diharapkan menjadi sebuah kebiasaan untuk berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

4. **Longterm**

Bekerja di PT. BPRS GALA MITRA ABADI merupakan rencana jangka panjang serta sepenuh hati, bukan sebuah batu loncatan sebelum diterima di perusahaan lainnya.

5. **Attitude**

Semua karyawan harus berperilaku yang baik, di kantor maupun di luar kantor

6. **Skill**

Karyawan harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya masing-masing.³

B. Visi dan Misi

VISI : “Menjadi BPRS yang Sehat dan Bermanfaat”

Deskripsi :

Dalam 3 tahun ke depan diharapkan PT.BPRS GALA MITRA ABADI sudah dapat mencapai kondisi yang stabil dengan tingkat kesehatan bank yang kokoh sebagai landasan bagi pengembangan kinerja bank di masa yang akan datang agar kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat

³ Company Profile BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

ekonomi mikro-kecil atas keberadaan bank ini menjadi lebih meningkat dan berkesinambungan.

MISI :

- a. Menjalankan operasi bank secara murni syariah.
- b. Melayani masyarakat ekonomi mikro-kecil secara optimal dengan mengedepankan pelayanan prima.
- c. Merekrut dan membina pegawai yang handal dan berakhlakul karimah, meningkatkan performance, komitmen dan kompetensi.
- d. Menjalankan SOP secara penuh dengan prinsip *Good Corporate Governance*.
- e. Menjaga kinerja bank dengan tetap konsisten menjaga kehati-hatian.
- f. Membangun kepercayaan masyarakat luas terhadap bank.⁴

C. Bidang Usaha

Sebagai suatu lembaga intermediasi PT. BPR Syariah Gala Mitra Abadi telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Fungsi tersebut adalah berkewajiban untuk menampung masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. PT. BPR Syariah Gala Mitra Abadi merancang dan mengembangkan aneka produk dan layanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah akan transaksi perbankan. Produk dan layanan tersebut berbasis bonus dan bagi hasil yang kompetitif, diantaranya :

1. Produk *Funding* :⁵

a. Tabungan IB Gala Mitra

Tabungan dalam simpanan dengan prinsip *Wadiah Yad Dhomanah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari bagi hasil usaha

⁴ Company Profile BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

⁵ *Ibid*

BPRS Gala Mitra Abadi. Dengan setoran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). BPRS Gala Mitra Abadi memberikan nisbah sebesar 44 : 56 dari hasil usaha bank pada rekening Tabungan *Salamah*, sebagai bukti bank akan memberikan buku tabungan dan menata usahanya atas nama nasabah. Untuk menjaga keakuratan dan ketetapan pelayanan bank melalui komputerisasi tabungan sesuai keinginan.

Dalam prinsip syari'ah sebenarnya tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau untuk konsumsi yang dapat ditrik setiap saat. Ada beberapa produk penghimpunan dana yang secara teknis *financial* dikembangkan bank syari'ah, salah satunya adalah Tabungan *Wadiah Salamah*. Tabungan yang dapat ditarik setiap saat tersebut mempergunakan prinsip *wadiah*. Tabungan *wadiah salamah* adalah tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *wadi'ah Yad Dhamanah* yang dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan giro, tabungan dan deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara.

Yang terpenting dalam hal ini si penyimpan bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut, konsekuensi dari ditetapkannya prinsip *Yad dhamanah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus.⁶

Sesungguhnya pun demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus

⁶ Company Profile BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai *indicator* kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif yang produktif dan menguntungkan.

Demikian juga dalam bentuk tabungan, bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadi'ah* adalah:

- 1) Bersifat simpanan,
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Tetapi banyak bank Islam yang telah berhasil mengombinasikan prinsip *al-wadi'ah* dengan prinsip *al-mudharabah*. Akibatnya pihak bank dapat menetapkan besarnya bonus yang diterima oleh penitip dengan menetapkan persentase. Mekanisme tabungan *Yad Dhamanah* dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Titip Dana
- 2) Pemanfaatan Dana
- 3) Bagi Hasil
- 4) Beri bonus⁷

⁷ Company Profile BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

b. Deposito Investasi Mitra IB

Deposito Mudharabah Abadi Tabunagan dalam bentuk simpanan atau investasi dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* yang memberikan bagi hasil yang menarik dan menguntungkan. Jangka waktu penempatan dan nisbah bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu
- 2) Nasabah Bank
- 3) 1 bulan 29% 71%
- 4) 3 bulan 29% 71%
- 5) 6 bulan 35% 65%
- 6) 12 bulan 35% 65%

Pembukuan rekening Deposito *mudharabah* Abadi setoran minimal Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah), dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Membawa KTP dan foto copy KTP
- b. Mengisi permohonan tabungan

2. Produk *Lending* :

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan dengan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilakukan melalui kerja sama antara dua pihak, dimana pemilik modal/bank (shahibul maal) menyediakan 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelolaan usaha (mudhorib) dengan jenis ataupun bentuk usaha yang telah disepakati.

b. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* Adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilakukan

melalui kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pemilik modal/ bank (*shohibul maal*) menyediakan modal 100% sedangkan pihak lainnya menjadi pengelolaan usaha (*mudharib*) dengan jenis ataupun bentuk usaha yang telah disepakati. Adapun jenis pembiayaan *murabahah* meliputi :

- 1) *Murabahah* Konsumtif Multiguna (MKM) adalah pembiayaan bagi pegawai/ pengusaha/ profesional untuk pembelian berbagai barang yang tidak bertentangan UU/hukum yang berlaku dan tidak termasuk yang diharamkan syari'ah Islam dengan minimal Rp. 20 juta s.d Rp. 2 milyar, jangka waktu maksimal 8 tahun.
- 2) *Murabahah* Konsumtif Rumah (MKR) adalah *murobahah* untuk pembelian rumah tinggal dengan maksimum Rp. 2 milyar, jangka waktu maksimal 15 tahun dan disyaratkan uang muka 20% dari harga perolehan.
- 3) *Mudharabah* Konsumtif Kendaraan (MKK) adalah *murobahah* konsemtif untuk pembelian kendaraan bermotor, jangka waktu untuk mobil baru maksimal 5 tahun, mobil *secound hand* jangka waktu 3 tahun, untuk motor baru jangka waktu maksimal 3 tahun dan untuk motor *secound hand* (umur teknis maksimal 5 tahun terakhir) jangka waktu maksimal 2 tahun, uang muka untuk MK disyaratkan minimal 20% dari harga perolehan.
- 4) *Murabahah* Konsumtif Pegawai (MKP) yaitu pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan suatu perusahaan/instansi untuk pembelian berbagai jenis barang (kecuali kendaraan bermotor) yang tidak bertentangan dengan UU/hukum yang berlaku serta tidak diharamkan dengan maksimal pembiayaan Rp. 20 juta jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun.
- 5) *Murabahah* Usaha Kecil (MUK) yaitu jenis pembiayaan *murabahah* untuk keperluan produktif/usaha kecil dengan maksimal s.d Rp. 150 juta. Perangkat analisisnya menggunakan

perangkat analisis standar yang terdiri dari MPP, laporan kunjungan setempat dan laporan verifikasi.

- 6) *Murabahah* Usaha Riel (MUR) yaitu pembiayaan dengan prinsip murabahah dianalisa menggunakan alat BCM.

c. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* Adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang ketentuannya disesuaikan dengan ketentuannya kekurangan dana dalam mengembangkan usaha.

d. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah* Adalah pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli. Pembiayaan ini berguna untuk anda yang menginginkan tambahan asset yang diperoleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pemilikan aset.

e. Pembiayaan *Qardh*

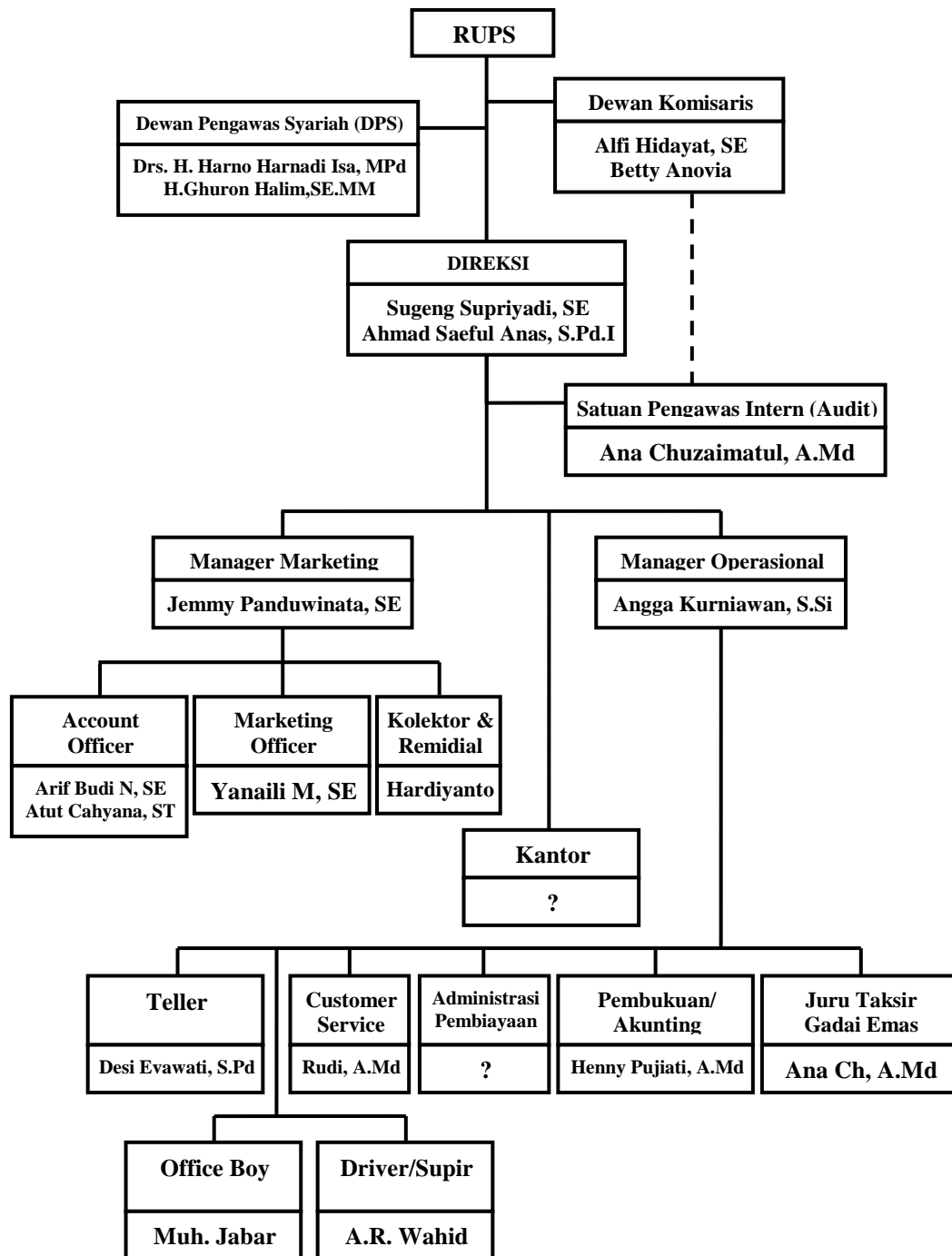
Pembiayaan *Qardh* adalah Pembiayaan lunak yang dikhususkan pada pengusaha kecil dan orang yang sangat membutuhkan.

f. Gadai Emas

Pembiayaan dengan prinsip gadai dan nasabah hanya dikenakan biaya sewa setiap bulannya. Kelebihan:

- 1) Proses cepat
- 2) Biaya sewa lebih murah
- 3) Potongan biaya administrasi didepan sehingga lebih murah

D. Struktur Organisasi



E. *Job Description*

a. Rapat Umum Pemegang Saham

- 1) Merupakan rapat tertinggi para pemegang saham PT. BPRS Giri Muria Group
- 2) Menentukan sentral kebijakan PT. BPRS Giri Muria Group

b. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Ringkasan Pekerjaan
DPS bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.
- 2) Tugas dan Tanggung Jawab
 - a) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah untuk menghimpun maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan yang berkaitan dengan syariah.
 - b) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk telah/ sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.
 - c) Bertanggung jawab atas pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan syariah.⁸

c. Dewan Komisaris

- 1) Ringkasan Pekerjaan
Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank dan memeberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Tugas dan tanggung jawab
 - a) Mempertimbangkan, menyepurnakadan mewakili pemegang saham dalm memutuskan perumusan kebijaka umum yang

⁸ Hasil Wawancara dengan *Customer Service* Bapak Rudi, 15 Januari 2016

baru yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang

- b) Menyelenggarakan RUPS dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi
- c) Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan Direksi
- d) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewenangan Direksi
- e) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi
- f) Menyetujui/ menolak pembiayaan yang diajukan oleh Direksi
- g) Menandatangani surat-surat saham saham yang telah diberi nomor urut sesuai anggaran dasar perseroan

d. Dewan Direksi

1) Ringkasan Pekerjaan

Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan seorang atau lebih sebagai Direktur, bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan bank sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.

2) Tugas dan Tanggungjawab Direktur Utama

- a) Mewakili Direksi atas nama perseroan
- b) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan
- c) Bertanggungjawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan

3) Tugas dan Tanggungjawab Direktur

- a) Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi

- b) Membantu Direktur Utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan
- c) Bertanggungjawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan
- d) Bersama-sama Direktur Utama bertanggungjawab kepada Rapat Pemegang Saham (RUPS)

e. Kepala Bagian Pemasaran

1) Ringkasan pekerjaan

Memimpin, mengawasi, dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan pendanaan, memasarkan produk Bank sesuai dengan Syariah Islam kepada nasabah dengan layanan prima sehingga memungkinkan untuk diperolehnya laba sesuai target dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan asset bank serta menciptakan produk baru yang sesuai dengan Syariah Islam.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memberikan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan terhadap staf yang ada dibawahnya
- b) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas laporan bulanan dan laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c) Menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang telah ditargetka bank
- d) Mengikuti pengembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar serta melihat factor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya
- e) Membawahi langsung *Account Officer*

f. *Account Officer*

1) Ringkasan Pekerjaan

AO Pembiayaan bertanggungjawab dalam memasarkan produk sesuai Syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang tela diberikan.

AO Pendanaan (*Funding Officer*) bertanggung jawab dalam memasarkan produk sesuai Syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memungkinkan untuk diperolehnya dana pihak ketiga yang sesuai dengan target dan memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memasarkan produk dengan melakukan solitasi dan presentasi pada calon nasabah
- b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi
- c) Bertanggung jawab kepada Direksi

g. *Bagian Administrasi dan Legal*

1) Ringkasan Pekerjaan

Mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memeriksa perlengkapan dan aspek yuridis setiap dokumen permohonan pembiayaan
- b) Melakukan taksasi (taksiran) jaminan sesuai dengan harga pasar

- c) Melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan calon nasabah
- d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian Direksi
- e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemasaran

h. Remedial

1) Ringkasan Pekerjaan

Menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan lebih dari tiga bulan dan mengatur penagihannya serta melaporkan hasil penagihan yang telah dilakukan kepada Direksi.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Membuat daftar nasabah dan jadwal penagihan sesuai instruksi
- b) Mengirimkan surat peringatan dan melakukan eksekusi serta penjualan jaminan kepada nasabah sesuai kondisi masing-masing
- c) Membuat laporan kunjungan (*call report*) dan laporan penggunaan Tanda Terima Uang Berseri (TTUB) yang digunakan dalam penagihan
- d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian
- e) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemasaran

i. Kepala Bagian Operasional

1) Ringkasan Pekerjaan

Memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

2) Tugas dan Tanggung jawab

- a) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang di bawahnya (Teller, Pembukuan, CS, Administrasi dan Legal, Kepala Kantor Kas, Bag. Umum Personalia).

- b) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan.
- c) Bertanggung jawab dalam pembuatan dan pengampaian laporan bulanan kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan direksi.
- e) Bertanggung jawab kepada direksi.

j. *Customer Service*

1) Ringkasan Pekerjaan

Meberikan pelayanan kepada setiap nasabah/ tamu dengan baik dan islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2) Tugas dan Tanggung jawab

- a) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan.
- b) Meregistrasi data nasabah, menginput data master nasabah pada program/ system.
- c) Membuat laporan bulanan sesuai interuksi operasi
- d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian/ Direksi
- e) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Operasional/ Direksi

k. *Teller*

1) Ringkasan Pekerjaan

Membantu dan melayani nasabah dalam hal menerima setoran, penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam *counter teller*.

2) Tugas dan Tanggung jawab

- a) Sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian teller dan semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas.

- b) Melaksanakan *cash count* akhir har atau pada saat pergantian teller.
- c) Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada *main vault*.
- d) Mencatat/ membuat daftar posisi kas setiap akhir hari.
- e) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Operasional.

l. Bagian Umum dan Personalia

1) Ringkasan Pekerjaan

Melaksanakan tugas pencatatan, pengadministrasian, serta pembinaan dalam kepersonaliaan, mengawasi ketersediaan perlengkapan layanan dibidang personalia dan umum.

2) Tugas dan Tanggung jawab

- a) Menginventarisasi kebutuhan karyawan dan atau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Pengawasan terhadap pengadaan inventaris kantor dan penyusutan serta pengendalian biaya.
- c) Melakukan pembayaran gaji, uang jasa, pesangon, lembur, dan lainnya sessuai ketentuan.
- d) Membuat laporan bulanan kepada Direksi.
- e) Membawahi langsung personalia, perlengkapan, pengemudi, satuan pengamanan, dan pramubakti.
- f) Bertanggung jawab kepada Direksi.

m. Bagian Pembukuan

1) Ringkasan Pekerjaan

Bertanggung jawab terhadap pekerjaan pembukuan yang berkaitan dan atau melalui bank koresponden.

2) Tugas dan Tanggung jawab

- a) Mengkliringkan *cheque* / bilyet giro yang telah jatuh tempo.
- b) Membukukan transaksi dan yang tidak dilakukan oleh teller dan bagian lainnya (seperti pemindahbukuan, aktiva-pasiva).

- c) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian.
- d) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Operasional.

n. Driver / Pengemudi

- 1) Ringkasan Pekerjaan
Mengemudikan dan merawat kendaraan bank.
- 2) Tugas dan Tanggung jawab
 - a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian.
 - b) Bertanggung jawab kepada Ketua Bagian Umum dan Personalia.

o. Pramubakti

- 1) Ringkasan Pekerjaan
Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventarisasi dokumen bank.
- 2) Tugas dan Tanggung jawab
 - a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian.
 - b) Bertanggung jawab kepada Ketua Bagian Umum dan Personalia.

p. Satuan Pengamanan

- 1) Ringkasan Pekerjaan
Melaksanakan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggung jawab pada keamanan bank.
- 2) Tugas dan Tanggung jawab
 - a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian.
 - b) Bertanggung jawab kepada Ketua Bagian Umum dan Personalia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembiayaan Multijasa PJTKI dengan Akad *Ijarah* di BPRS Gala Mitra Abadi

Persyaratan pengajuan merupakan hal penting untuk mendapatkan pembiayaan. Persyaratan yang dimaksud adalah semua hal yang harus dipenuhi dan menjadi dasar bagi suatu lembaga keuangan syariah dalam memberikan suatu nilai layak atau tidaknya permohonan pembiayaan calon nasabah. Penilaian tersebut dinilai dari lengkap atau tidaknya syarat yang diajukan, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka akan berakibat permohonan yang diajukan nasabah akan ditolak dengan lembaga keuangan tersebut.

Maka syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum mengajukan pembiayaan BPRS Gala Mitra Abadi, antara lain:

- a) Fotocopy KTP suami dan istri
- b) Fotocopy Kartu Keluarga
- c) Fotocopy Buku Nikah
- d) Fotocopy rekening listrik, PAM
- e) Slip gaji dan rekening tabungan
- f) Fotocopy Jaminan (BPKB/sertifikat tanah) untuk jaminan sertifikat dilampirkan PBB.¹

Setelah syarat-syarat dipenuhi oleh mitra atau nasabah. Maka selanjutnya akan diproses oleh pihak BPRS untuk mendapatkan pembiayaan dengan langkah-langkah pembiayaan.

Berikut adalah langkah-langkah proses pembiayaan yang dilakukan pihak bank:

- a) Berkas-berkas syarat yang ditentukan harus dilengkapi

¹Hasil Wawancara dengan *Direksi* Bapak Ahmad Saeful Anas, 15 Januari 2016

- b) Diterima Customer Service, data dikirim ke bagian Adminstrasi untuk dicek kembali berkasnya
- c) Di bagian Administrasi apabila sudah selesai diberikan ke Account Officer (AO) atau bagian survey
- d) Bagian survey melaporkan hasil survey 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*)
- e) Laporan rekomendasi
- f) Setelah itu laporan hasil survey diberikan ke kepala bagian untuk selanjutnya di rapat rekomendasi
- g) Pengajuan pembiayaan disetujui atau tidaknya tergantung rapat komite
- h) Jika disetujui, berkas-berkas dikembalikan ke Customer Service
- i) Dan Customer Service segera menginformasikan ke nasabah.²

Dengan proses pengajuan pembiayaan, hal ini nasabah atau mitra yang membutuhkan pembiayaan untuk membayar biaya konsumtif dapat mendatangi pemilik dana (bank) untuk pembayaran konsumtif. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (bank) sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

- a) Menyediakan barang atau jasa yang diberikan
- b) Menanggung biaya pemeliharaan atau biaya yang dibutuhkan oleh nasabah
- c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang atau jasa yang disewakan

Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

- a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab
- b) Menanggung biaya

² *Ibid.*

Fitur dan mekanisme Pembiayaan *Multijasa* atas dasar akad *Ijarah* adalah:

- a) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Ijarah* dengan nasabah;
- b) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah;
- c) Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk utang.

Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa

- a) Nasabah mengajukan pembiayaan ke BPRS syari'ah
- b) BPRS syari'ah menerima pengajuan dari nasabah dan memberikan syarat-syarat pembiayaan agar untuk dilengkapi
- c) Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai penggunaan pembiayaannya, maka akad di tanda tangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki
- d) BPRS memberikan pembiayaan kepada nasaba sesuai akad yang disepakati. Setelah periode akad berakhir dan nasabah menyelesaikan kewajibannya, BPRS mengembalikan jaminan kepada nasabah yang diserahkan bank sebelumnya.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

B. Penerapan Akad *Ijarah* Multijasa di BPRS Gala Mitra Abadi

Pembiayaan *ijarah* multijasa adalah produk pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan atas manfaat akan suatu jasa. Jadi produk ini adalah memenuhi kebutuhan Mitra atau Nasabah. Dan produk pembiayaan Multijasa ini adalah produk unggulan di BPRS Gala Mitra Abadi.³ Produk Multijasa BPRS Gala Mitra Abadi untuk mengurus dokumen calon TKI, seperti *Medical chekup, visa, passport*, Surat Rekomendasi, Tiket.

³Hasil Wawancara dengan *Customer Service* Bapak Rudi, 15 Januari 2016

Sumber dana untuk pembiayaan *Ijarah* Multijasa adalah berasal dari beberapa pihak, yaitu para nasabah, partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko dan investasi khusus. Jenis pembiayaan multijasa ini berjangka pendek karena bank tidak banyak mengambil resiko dalam pembiayaan multijasa. Produk multijasa di BPRS Gala Mitra Abadi tidak sama di bank-bank syariah lainnya karena berjangka pendek.⁴ Alasan dengan adanya produk Multijasa, karena:

- a) Melihat kebutuhan pasar, dalam hal ini yaitu kebutuhan mitra atau nasabah yang meminta pembiayaan untuk membiayai sekolah anaknya, membiayai kebutuhan hidup, membiayai perawatan rumah sakit, dan lain-lain.
- b) Adanya fatwa mengenai pembiayaan multijasa. Dengan fatwa ini maka dapat dilihat pedoman yang sesuai dengan syariah.

Produk pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi Porwodadi yaitu menggunakan akad *ijarah* dan akad *wakalah*. Pada dasarnya semua pembiayaan prosedurnya dan akadnya berbeda kecuali akad *wakalah*. Jadi disetiap pembiayaan terjadi akad *wakalah*. Pada pembiayaan Multijasa ini menggunakan akad *ijarah* dikarenakan produk ini berbasis jasa. Dan akad *wakalah* bank sebagai perantara.⁵ Hal ini dilihat dari sesuai kebutuhan nasabah. Yaitu pada saat pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Proses pembiayaan *Ijarah* Multijasa di Lapangan :

- 1) Ketika mitra atau nasabah membutuhkan bantuan dana maka mitra atau nasabah akan mendatangi BPRS Gala Mitra Abadi dan mengajukan permohonan dana talangan untuk memperoleh suatu manfaat, kemudian memenuhi persyaratan yang diajukan.
- 2) Jika persyaratan terpenuhi pihak BPRS Gala Mitra Abadi akan melaksanakan uji kelayakan bagi nasabah. Dalam menganalisis

⁴Hasil Wawancara dengan *Manager Operasional* Bapak Angga Kurniawan, 15 Januari 2016

⁵ *Ibid.*

kelayakan nasabah pada pembiayaan ini sama halnya dengan pembiayaan lainnya. Dalam tahap ini terjadi negoisasi mengenai spesifikasi jasa, harga, besarnya ujah, jumlah cicilan, dan jangka waktu pembayaran.

- 3) Setelah pihak BPRS Gala Mitra Abadi memutuskan untuk membantu mitra atau nasabah maka kedua pihak mengadakan suatu akad.

Dalam proses pembiayaan *ijarah* multijasa, kebanyakan Mitra atau nasabah belum mengetahui produk apa yang akan diajukan oleh Mitra atau nasabah. Pada saat Mitra atau nasabah datang ke BPRS Gala Mitra Abadi untuk mengajukan pembiayaan untuk melakukan transaksi pengurusan dan pembayaran biaya calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), maka pihak BPRS Gala Mitra Abadi memberikan produk pembiayaan *Ijarah* Multijasa. Dengan kata lain, Mitra atau nasabah belum mengenal produk tersebut sebelumnya.

Prosedur pengajuan pembiayaan adalah cara-cara yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemberian pembiayaan, setiap pemberian pembiayaan harus dibuatkan suatu perjanjian (akad) antara lembaga keuangan syariah sebagai pemberi pembiayaan dan nasabah sebagai pemohon. Dalam perjanjian (akad) pembiayaan dicantumkan segala hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dibuatnya Perjanjian (akad) yang diterapkan oleh Bank dilihat dari:

- a) Obyek kebutuhan pembiayaan dari nasabahnya
- b) Tujuan pembiayaan yang diajukan dari nasabah
- c) Berdasarkan persetujuan kesepakatan antara bank dan nasabah

Dalam skim pembiayaan Multijasa di BPRS Gala Mitra Abadi menggunakan akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Dengan menggunakan akad *ijarah*, Mitra atau nasabah memberikan imbalan sebagai kompensasi atas pelayanan berupa pembayaran yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak ketiga. Setelah

itu mitra membayar kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan cara mengangsur atau sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Angsuran yang disepakati pada tahap awal pembiayaan tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan. Dengan demikian, angsuran pembiayaan multijasa ini tetap. Adapun penetapan ujah keuntungan bagi bank dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Dalam aplikasinya, BPRS Gala Mitra Abadi tidak membayar sendiri manfaat akan jasa yang mitra atau nasabah butuhkan. BPRS Gala Mitra Abadi hanya memberikan sejumlah uang dan menyerahkan kuasa kepada mitra atau nasabah untuk membayarkan atau membeli jasa manfaat yang mitra ajukan. Dengan demikian Mitra atau nasabah sendiri yang melakukan jasa pembayaran. Dalam akad, menyatakan dalam beberapa hal, yaitu:

- a) BPRS sebagai pihak yang mewakilkan kepada Mitra atau nasabah
- b) Mitra atau nasabah sebagai pihak yang mewakili BPRS
- c) BPRS memberikan sejumlah uang kepada Mitra atau nasabah sekaligus memberikan kuasa penuh kepada Mitra atau nasabah untuk membayar kepada pihak ketiga sebagaimana yang dinyatakan dalam surat keterangan dan bukti-bukti yang terlampir
- d) Mitra menerima sejumlah uang dan kuasa yang diberikan untuk membayar kebutuhannya sesuai dengan keterangan pengajuan mitra atau nasabah.

Setelah penulis meneliti tentang penerapan akad *Ijarah* Multijasa untuk system pembiayaan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, maka dari itu untuk menerapkan akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan atas objek kebutuhan pembiayaan dari nasabahnya, penulis menganalisis hal berdasarkan analisis deskriptif yaitu Pembiayaan *Ijarah* Multijasa adalah suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad *ijarah*, dalam penyaluran jasa keuangannya untuk memenuhi transaksi pengurusan dan pembayaran biaya calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Bank bertindak sebagai

pemberi sewa atau pemberi jasa dan nasabah bertindak sebagai penyewa atau pengguna jasa.⁶

Dalam pemberian pembiayaan *Ijarah Multijasa* ini, BPRS Gala Mitra Abadi akan memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau (*fee*) menurut kesepakatan di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase.⁷

Karakteristik *Ijarah Multijasa* yaitu memenuhi kebutuhan nasabah untuk jasa pembiayaan yang bersifat non fisik dan bersifat pelayanan jasa, obyeknya lebih dari satu. Dan penerapan akad ditentukan berdasarkan objek kebutuhan pembiayaan dari nasabahnya, tujuan pembiayaan yang diajukan dari nasabah, berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

1) Contoh Kasus Pembiayaan *Ijarah Multijasa*

Ibu Sumarsih membutuhkan dana untuk melakukan transaksi pengurusan dan pembayaran calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Untuk kebutuhan ini Ibu Sumarsih datang ke BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi untuk mengajukan pembiayaan. Setelah itu bank menanyakan guna mengajukan pembiayaan, lalu bank menetapkan akad *Multijasa* untuk pembiayaan yang diajukan oleh Ibu Sumarsih. Akad ini di buat sesuai dengan kebutuhan Ibu Sumarsih. Dengan ini bank bertindak sebagai pemberi sewa atau pemberi jasa dan nasabah bertindak sebagai penyewa atau pengguna jasa. Bank setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk memberikan jasa pengurusan dokumen dan pembayaran biaya calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebesar Rp. 20.000.000,- dan jangka waktu 3 bulan, maka akan dirinci sebagai berikut:

⁶Brosur Pembiayaan Akad *Ijarah* BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

⁷Fatwa DSN-MUI No 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan *Multijasa*

Jumlah Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa	: Rp. 20.000.000,-
Jangka Waktu	: 3 bulan
Biaya Administrasi	: Rp. 400.000,-
Biaya Notaris	: Rp. 25.000,-
Biaya Asuransi	: Rp. 28.000,-
Ujrah/ <i>fee</i>	: Rp. 1.800.000,-
Cara pembayaran	: Angsuran Bulanan

2) Tabel Pertumbuhan Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Gala Mitra Abadi

Jenis Produk	2015	2016 Q1
Pembiayaan Multijasa	2,015,000	1,900,000
Jumlah Debitur Multijasa	107 debitur	95 debitur

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas tentang Penerapan Akad *Ijarah* pada Produk Multijasa PJTKI di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa, pembiayaan Multijasa adalah suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad *ijarah*, dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain: penyaluran pelayanan jasa, pendidikan, kesehatan, umrah dan lain-lain.

Persyaratan pengajuan merupakan hal penting untuk mendapatkan pembiayaan. Persyaratan yang dimaksud adalah semua hal yang harus dipenuhi dan menjadi dasar bagi suatu lembaga keuangan syariah dalam memberikan suatu nilai layak atau tidaknya permohonan pembiayaan calon nasabah. Penilaian tersebut dinilai dari lengkap atau tidaknya syarat yang diajukan, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka akan berakibat permohonan yang diajukan nasabah akan ditolak dengan lembaga keuangan tersebut.

Dalam skim pembiayaan Multijasa di BPRS Gala Mitra Abadi menggunakan akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Dengan menggunakan akad *ijarah*, Mitra atau nasabah memberikan imbalan sebagai kompensasi atas pelayanan berupa pembayaran yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak ketiga. Setelah itu mitra membayar kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan cara mengangsur atau sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

B. Saran

Dalam sebuah lembaga keuangan untuk mencapai peningkatan jumlah syariah perlu dilakukan hal-hal berikut :

1. Bagi perusahaan
 - a) Dalam menjalankan bisnis syariah ini supaya mengedepankan nilai-nilai syariah agar tidak sama dengan bisnis konvensional, terutama dalam mensosialisasikan produk-produk pembiayaan kepada nasabah.
 - b) Perlu adanya peningkatan pelayanan dalam pembiayaan.
 - c) Hal pemasaran yang dilakukan mengenai produk pembiayaan harus lebih meyakinkan nasabah bahwa margin berbeda dengan system bunga yang ada di bank konvensional.
 - d) Pelayanan yang sudah ada diharapkan untuk lebih ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan tentang prinsip-prinsip perbankan syariah.
 - e) Evaluasi secara rutin terhadap keberhasilan strategi yang telah digunakan sehingga seluruh kebijakan dapat terpantau dan terencana dengan disesuaikan pada system syariah dan SOP BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
 - f) Memperbanyak jumlah kantor pelayanan, agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
2. Bagi Masyarakat
 - a) Agar melakukan pengajuan pembiayaan, baik di bank syariah maupun BPRS karena tidak ada unsur *gharar, masyir, riba, zalim, dan haram*.
 - b) Pembiayaan di BPRS aman karena dijamin oleh LPS.
 - c) Untuk pembiayaan sebaiknya nasabah mengajukan pembiayaan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi guna menghindari bunga di bank konvensional

C. Penutup

Demikian penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul “Penerapan Akad *Ijarah* pada Produk Pembiayaan Multijasa PJTKI di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi” sebagai tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Dengan segala kekurangan dan kerendahan hati penulis panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sehingga butuh proses untuk menjadi yang lebih baik lagi.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak diharapkan untuk penyempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Harapan penulis semoga penulisan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Terima kasih

DAFTAR PUSTAKA

- Ariskasari, Ruri Priti, 2014, "*Analisis Penerapan Akad Ijarah Multijasa untuk Sistem Pembiayaan di PT. BPRS PNM Binama Semarang*", Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Brosur Pembiayaan Akad *Ijarah* BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi
- Bungin, Burhan, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Prenada Media, Jakarta.
- Company Profile BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi
- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*
- Fatwa DSN-MUI No 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Jakarta.
- Hasil Wawancara dengan *Customer Service* Bapak Rudi.
- Hasil Wawancara dengan *Direksi* Bapak Ahmad Saeful Anas.
- Hasil Wawancara dengan *Manager Operasional* Bapak Angga Kurniawan.
- Inayatul Asyihah, 2015, "*Implementasi Produk Pembiayaan Multijasa di BPRS PNM BINAMA Semarang*", Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Karim, Adiwarman, 2003, *Bank Islam-Analisis Fiqih dan Keuangan*, IIT Indonesia, Jakarta.

- Khotibul Umam, 2009, *Trend Pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008*, (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muhammad, 2014, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Rajawali Press, Jakarta.
- Muhammad, 2008, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, 2009, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Muthaher, Osmad, 2012, *Akutansi Perbankan Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Meleong, Lexi J., 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Resda Karya, Bandung.
- Narbuko, Cholid, et al., 2003, *Metodologi Penelitian*, PT BumiAksara, Jakarta.
- Nazir, Moh, 2003, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Q.S. Al-Baqarah (2) : 233
- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fikih Sunnah bag.13*, Al Ma'rifat, Bandung.
- Sudarsono, Heri, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Wangsawidjaja, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Dyah Febri Ariyani
2. Tempat & Tgl Lahir : Semarang, 22 Februari 1993
3. Alamat Rumah : Jl. Trengguli 2 No. 19a RT 06 RW 06 Semarang
4. Email : dyahfebrya@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Darmarini 01 Mranggen
2. SD Kartini 03 Semarang
3. SMP N 32 Semarang
4. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 Mantingan Ngawi
5. Program D.3 Perbankan Syariah, UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Juni 2016

Penulis

Dyah Febri Ariyani